

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia adalah makhluk yang memiliki kebutuhan yang kompleks, mulai kebutuhan pokok hingga kebutuhan tambahan (sekunder). Diantara banyak kebutuhan tersebut manusia juga membutuhkan konsumsi non makanan seperti aneka barang dan jasa, perumahan, fasilitas rumah tangga, fashion, hingga barang tahan lama seperti mobil, alat elektronik dan sebagainya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut manusia harus mengeluarkan sejumlah pengeluaran. Dalam beberapa tahun terakhir masyarakat di Indonesia pada umumnya atau pun Sumatera Barat pada khususnya terus mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi, sehingga aktifitas mereka untuk mengkonsumsi komoditi non makanan semakin tinggi.

Masyarakat pada umumnya akan berlomba lomba untuk memenuhi kebutuhan mereka terhadap produk non makanan sebagai bagian dari prestise hidup. Masyarakat memang memiliki kebutuhan konsumsi non makanan yang berbeda, tetapi setiap individu dipastikan tidak akan pernah bisa lepas dari adanya kebutuhan non makanan. Menurut Rivai (2016) masyarakat Sumatera Barat tergolong sebagai masyarakat yang konsumtif terhadap produk non makanan khususnya fashion dan barang tahan lama. Hal tersebut didorong karena dua komoditas tersebut, serta telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat yang lebih mementingkan prestise dibandingkan kebutuhan yang seharusnya harus segera dipenuhi. Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari BPS Sumatera Barat diperoleh pengeluaran rata rata rumah tangga untuk konsumsi non makanan pada 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat terlihat pada Tabel 1.1 di bawah ini:

Tabel 1.1
Jumlah Rata Rata Pengeluaran Rumah Tangga Untuk Konsumsi Non Makanan Pada 19
Kabupaten dan Kota Di Sumatera Barat Tahun 2016 – 2020

No	Kabupaten / Kota	Pengeluaran Rumah Tangga (Rp)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kab. Kepulauan Mentawai	278.312	304.194	325.688	314.320	418.263
2	Kab. Pesisir Selatan	307.626	389.641	423.624	506.723	459.491
3	Kab. Solok	381.313	368.540	447.836	453.572	427.685
4	Kab. Sijunjung	383.860	483.690	483.210	496.364	568.919
5	Kab. Tanah Datar	387.443	353.095	459.337	465.416	486.966
6	Kab. Padang Pariaman	325.122	386.292	463.562	465.216	516.563
7	Kab. Agam	349.346	416.166	433.486	464.627	482.814
8	Kab. Lima Puluh Kota	305.166	351.786	434.510	433.468	508.419
9	Kab. Pasaman	262.042	280.066	329.250	413.499	426.085
10	Kab. Solok Selatan	368.594	381.224	488.925	561.394	635.193
11	Kab. Dharmasraya	402.801	438.049	538.038	647.889	668.293
12	Kab. Pasaman Barat	402.340	349.070	416.275	442.391	43.628
13	Kota Padang	761.361	766.512	910.141	941.130	1.006.585
14	Kota Solok	598.190	574.550	677.166	765.732	681.828
15	Kota Sawahlunto	495.384	509.574	554.878	706.917	683.978
16	Kota Padang Panjang	820.927	654.824	661.021	1016.409	737.619
17	Kota Bukittinggi	649.340	764.869	767.414	861.872	952.493
18	Kota Payakumbuh	665.105	611.530	651.116	845.525	817.015
19	Kota Pariaman	535.438	542.766	604.385	733.255	685.428
	Rata Rata	456.827	469.813	529.993	607.143	789.856

Sumber: Badan Pusat Statistik Sumatera Barat (2021)

Berdasarkan Tabel 1.1 terlihat bahwa rata rata pengeluaran masyarakat untuk konsumsi non makanan relatif mengalami peningkatan dari tahun 2016 sampai dengan 2020 yang lalu. Jumlah konsumsi non makanan terendah mencapai Rp 456.827 di tahun 2016, seiring dengan semakin menurunnya nilai mata uang Rupiah mendorong komoditi non konsumsi cenderung terus mengalami kenaikan, sehingga mengakibatkan pengeluaran masyarakat untuk memenuhi kebutuhan tersebut semakin tinggi. Ditahun 2020 jumlah rata rata pengeluaran masyarakat untuk

konsumsi non makanan Rp 789.856. Meningkatnya pengeluaran masyarakat untuk konsumsi non makanan juga mengisyaratkan semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat pada 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat.

Wahyuningsih (2017) mengungkapkan konsumsi non makanan berkaitan dengan aktivitas menghabiskan manfaat sebuah produk diluar makanan. Konsumsi yang dimaksud berkaitan dengan konsumsi barang dan jasa diluar makanan seperti pendidikan, layanan kesehatan hingga konsumsi kebutuhan sekunder seperti membeli mobil, sarana pendidikan dan sebagainya. Pola konsumsi non makanan akan meningkat sejalan dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Ketika masyarakat memiliki kelebihan pendapatan maka konsumsi non makanan akan semakin tinggi. Selain itu konsumsi non makanan akan meningkat karena faktor situasi seperti terjadi pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi, wabah penyakit, perang dan sebagainya.

Peningkatan konsumsi masyarakat pada non makanan tentu tidak terjadi dengan sendirinya akan tetapi tentu dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Menurut Setiani (2021) meningkatnya konsumsi pangan atau makanan pada masyarakat dapat dipengaruhi oleh jumlah anggota keluarga, pendidikan dan pertumbuhan ekonomi. Ketika jumlah anggota keluarga dalam sebuah keluarga semakin banyak, dan pada umumnya anggota keluarga berada dalam usia sekolah maka pengeluaran untuk kebutuhan pangan akan semakin tinggi, hal yang sama juga berlaku untuk pertumbuhan ekonomi, ketika sebuah daerah memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi maka semakin besar pengeluaran masyarakat untuk melakukan konsumsi pangan atau makanan.

Zebua et al., (2020) jumlah anggota keluarga merupakan salah satu faktor yang mendorong meningkatnya pengeluaran masyarakat untuk konsumsi non makanan. Ketika sebuah

keluarga memiliki anggota yang relatif banyak tentu kebutuhan masing masing individu khususnya pada komoditi non makanan juga akan semakin tinggi, mengingat disamping kebutuhan pokok masyarakat juga memerlukan pemenuhan kebutuhan untuk konsumsi non makanan seperti membeli peralatan rumah tangga, obat obatan atau untuk biaya pendidikan dan berbagai biaya lainnya.

Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi terbesar di Pulau Sumatera, hal tersebut terlihat dari jumlah penduduk Sumatera Barat yang terus meningkat baik yang bertambah akibat angka kelahiran atau pun bertambah karena migrasi (Yulisitiana, 2021). Selain itu survei yang dilakukan oleh Lembaga Riset Pembangunan Indonesia (LRPI) tahun 2020 mengungkapkan pada umumnya masyarakat di Sumatera Barat memiliki jumlah anggota keluarga empat orang, yang terdiri dari ayah, ibu dan dua anak. Jumlah anggota keluarga inti menjadi tanggungan dari kepala keluarga, termasuk untuk memenuhi kebutuhan konsumsi baik makanan atau pun non makanan. Semakin banyak jumlah anggota keluarga maka berbanding lurus dengan jumlah konsumsi dari keluarga baik pada komoditi makanan atau pun non makanan. Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari Badan Pusat Statistik Sumatera Barat diperoleh gambaran jumlah rata rata anggota keluarga pada 19 kabupaten dan kota yang terlihat pada Tabel 1.2 di bawah ini:

Tabel 1.2

Jumlah Rata Rata Anggota Keluarga Pada 19 Kabupaten dan Kota Di Sumatera Barat Tahun 2016 – 2020

No	Kabupaten / Kota	Jumlah Anggota Keluarga (Orang)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kab. Kepulauan Mentawai	4	4	4	4	4
2	Kab. Pesisir Selatan	4	4	4	4	4
3	Kab. Solok	4	4	4	4	4
4	Kab. Sijunjung	4	4	4	4	4
5	Kab. Tanah Datar	4	4	4	4	4
6	Kab. Padang Pariaman	4	4	4	4	4
7	Kab. Agam	4	4	4	4	4
8	Kab. Lima Puluh Kota	4	4	4	4	4
9	Kab. Pasaman	4	4	4	4	4
10	Kab. Solok Selatan	4	4	4	4	4
11	Kab. Dharmasraya	4	4	4	4	4
12	Kab. Pasaman Barat	4	4	4	4	4
13	Kota Padang	4	4	4	4	4
14	Kota Solok	4	4	4	4	4
15	Kota Sawahlunto	4	4	4	4	4
16	Kota Padang Panjang	4	4	4	4	4
17	Kota Bukittinggi	4	4	4	4	4
18	Kota Payakumbuh	4	4	4	4	4
19	Kota Pariaman	5	5	5	5	5
	Rata Rata	4	4	4	4	4

Sumber: Badan Pusat Statistik Sumatera Barat, 2021

Sesuai dengan Tabel 1.2 terlihat rata rata jumlah anggota keluarga pada 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat dari tahun 2016 sampai dengan 2020 tidak jauh berbeda, dimana dari data terlihat jumlah anggota keluarga terbanyak lebih kurang 5 orang sedangkan jika diamati dari rata rata jumlah anggota keluarga keseluruhan dapat disimpulkan setiap keluarga pada 19 kabupaten dan kota terdiri dari empat orang anggota keluarga. Walaupun demikian dimasa pandemi tentu pola konsumsi dan kebutuhan nutrisi makanan bagi seluruh anggota keluarga akan semakin tinggi sehingga diduga tetap akan mendorong meningkatnya pengeluaran rumah tangga di 19 kabupaten dan kota untuk makanan.

Hasil penelitian yang membahas pengaruh jumlah anggota keluarga terhadap pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi non makanan telah dilakukan oleh Setiani (2021) menemukan jumlah anggota keluarga berpengaruh positif terhadap jumlah pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi non makanan, selanjutnya hasil penelitian Mardiana (2020) yang menemukan semakin banyak jumlah anggota keluarga akan semakin meningkatkan pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi non makanan, selain itu hasil yang sejalan lainnya diperoleh oleh Zebua et al., (2020) yang menemukan jumlah anggota keluarga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi non makanan.

Disamping jumlah anggota keluarga peningkatan konsumsi rumah tangga untuk komoditas non makanan juga dapat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan anggota keluarga. Semakin banyak anggota keluarga yang mengenyam pendidikan tinggi tentu pengeluaran untuk konsumsi non makanan semakin tinggi, seperti pakaian, barang elektronik, fasilitas belajar dan berbagai komoditas lainnya (Fauzan, 2015). Pendidikan akan membuat aktifitas anggota keluarga semakin aktif, karena mereka akan mendapatkan pendidikan di sekolah atau jalur formal, untuk melakukan hal tersebut dibutuhkan konsumsi non makanan.

Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari Badan Pusat Statistik Sumatera Barat terlihat perkembangan pendidikan masyarakat yang diamati dari angka partisipasi sekolah (APS). Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) angka partisipasi sekolah menunjukkan proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah (tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuh) terhadap produk kelompok usia tertentu. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Sumatera Barat terlihat pada Tabel 1.3 di bawah ini:

Tabel 1.3

Data Angka Partisipasi Sekolah di 19 Kabupaten dan Kota Sumatera Barat Tahun 2016 – 2020 (Dalam Satuan Persentase)

No	Kabupaten / Kota	Pendidikan (APS)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kab. Kepulauan Mentawai	39.41	42.89	40.18	40.21	41.28
2	Kab. Pesisir Selatan	70.04	72.55	73.68	74.40	75.27
3	Kab. Solok	57.20	56.10	56.34	57.04	56.95
4	Kab. Sijunjung	51.63	55.42	59.16	59.85	60.64
5	Kab. Tanah Datar	69.31	68.50	68.54	68.48	69.31
6	Kab. Padang Pariaman	69.47	71.01	71.78	70.87	71.18
7	Kab. Agam	69.04	67.72	67.48	68.13	68.86
8	Kab. Lima Puluh Kota	70.65	71.09	74.55	74.82	74.55
9	Kab. Pasaman	54.56	52.12	53.96	54.74	54.85
10	Kab. Solok Selatan	67.15	67.31	64.54	63.82	64.30
11	Kab. Dharmasraya	54.36	56.77	55.55	54.76	56.85
12	Kab. Pasaman Barat	68.80	68.09	63.33	63.94	64.83
13	Kota Padang	71.48	74.24	75.77	76.50	76.39
14	Kota Solok	69.63	71.22	69.64	69.26	72.15
15	Kota Sawahlunto	73.50	72.25	71.56	70.86	70.92
16	Kota Padang Panjang	73.93	77.25	73.81	74.58	74.80
17	Kota Bukittinggi	81.52	79.06	77.66	78.28	78.20
18	Kota Payakumbuh	67.36	68.76	70.52	71.09	71.63
19	Kota Pariaman	80.75	71.27	63.48	78.31	77.40
	Rata-Rata	67.12	67.30	67.48	68.90	68.99

Sumber : Badan Pusat Statistik Sumatera Barat, 2021

Berdasarkan Tabel 1.3 terlihat bahwa sebaran angka partisipasi sekolah yang diamati dari jenjang pendidikan SMA pada 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat relatif berbeda beda,terdapat sejumlah kabupaten dan kota yang memiliki persentase angka partisipasi sekolah dibawah 50% yaitu masyarakat di Kepulauan Mentawai dan beberapa daerah kabupaten dan kota lainnya di Sumatera Barat,walaupun demikian tingkat angka partisipasi sekolah jenjang SMA di Sumatera Barat relatif tinggi,sehingga dipastikan pengeluaran masyarakat untuk konsumen non makanan relatif tinggi.

Hasil penelitian yang membahas pengaruh pendidikan terhadap pengeluaran rumah tangga untuk kesehatan telah dilakukan oleh Hanum (2018) yang menemukan bahwa pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi non makanan. Hasil penelitian yang sejalan lainnya juga diperoleh oleh Anjar (2020) yang menemukan pendidikan akan membuat setiap anggota keluarga mengeluarkan energi yang besar untuk belajar, atau pun untuk beraktifitas fisik, sehingga dibutuhkan nutrisi makanan yang akan mendorong meningkatnya pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi non makanan. Selanjutnya hasil penelitian Erwin dan Karmini (2012) menemukan bahwa pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi non makanan.

Menurut Todaro (2011) meningkatnya pola konsumsi masyarakat pada komoditi non makanan juga dapat dipengaruhi oleh tingkat upah yang diterima oleh kepala keluarga. Ketika tingkat upah yang diterima semakin tinggi, maka upah tersebut tidak hanya digunakan untuk pengeluaran konsumsi makanan tetapi kelebihanannya juga dapat digunakan untuk konsumsi non makanan seperti rekreasi, memiliki kendaraan, tanah hingga layanan kesehatan (Wuryandari, 2015). Pada umumnya pemerintah di setiap provinsi di Indonesia menetapkan standar upah bagi buruh, atau disebut dengan Upah Minimum Provinsi

Upah minimum provinsi yang besar di identikan oleh masyarakat dapat memenuhi kebutuhan mereka untuk konsumsi non makanan, karena semakin tinggi upah yang diterima tentu akan mendorong adanya kelebihan pendapatan yang tidak digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam bentuk makanan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Sumatera Barat diperoleh perkembangan masyarakat yang bekerja sektor publik atau masyarakat yang berstatus Pegawai Negeri Sipil pada 19 kabupaten dan kota seperti terlihat pada Tabel 1.4 di bawah ini:

Tabel 1.4**Perkembangan Upah Minimum Provinsi 19 Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat
Tahun 2016 – 2020**

No	Kabupaten / Kota	UMP (Rupiah)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kab. Kepulauan Mentawai	1.800.725	1.949.284	2.119.067	2.289.228	2.484.041
2	Kab. Pesisir Selatan	1.740.725	1.850.284	2.000.090	2.125.200	2.350.025
3	Kab. Solok	1.800.725	1.949.284	2.119.067	2.220.400	2.375.000
4	Kab. Sijunjung	1.785.400	1.850.410	2.050.410	2.289.228	2.484.041
5	Kab. Tanah Datar	1.670.500	1.949.284	2.119.067	2.289.228	2.484.041
6	Kab. Padang Pariaman	1.800.725	1.949.284	2.119.067	2.289.228	2.484.041
7	Kab. Agam	1.800.725	1.949.284	2.119.067	2.289.228	2.484.041
8	Kab. Lima Puluh Kota	1.800.725	1.949.284	2.119.067	2.289.228	2.484.041
9	Kab. Pasaman	1.800.725	1.949.284	2.119.067	2.289.228	2.484.041
10	Kab. Solok Selatan	1.800.725	1.949.284	2.119.067	2.289.228	2.484.041
11	Kab. Dharmasraya	1.800.725	1.949.284	2.119.067	2.289.228	2.484.041
12	Kab. Pasaman Barat	1.800.725	1.949.284	2.119.067	2.289.228	2.484.041
13	Kota Padang	1.800.725	1.949.284	2.119.067	2.289.228	2.484.041
14	Kota Solok	1.800.725	1.949.284	2.119.067	2.289.228	2.484.041
15	Kota Sawahlunto	1.800.725	1.949.284	2.119.067	2.289.228	2.484.041
16	Kota Padang Panjang	1.800.725	1.949.284	2.119.067	2.289.228	2.484.041
17	Kota Bukittinggi	1.800.725	1.949.284	2.119.067	2.289.228	2.484.041
18	Kota Payakumbuh	1.800.725	1.949.284	2.119.067	2.289.228	2.484.041
19	Kota Pariaman	1.800.725	1.949.284	2.119.067	2.289.228	2.484.041

Sumber: Badan Pusat Statistik Sumatera Barat, 2021

Sesuai dengan Tabel 1.3 terlihat bahwa setiap kabupaten dan kota di Sumatera Barat mengikuti besaran Upah Minimum Provinsi yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi. Jika diamati nilai Upah Minimum Provinsi yang diterima oleh buruh relatif meningkat. Dengan

meningkatnya upah yang diterima kepala keluarga yang bekerja sebagai buruh tentu memberikan kemampuan yang lebih tinggi bagi kepala keluarga untuk melakukan pengeluaran untuk mengkonsumsi kebutuhan non makan seperti rekreasi, pendidikan, mendapatkan layanan kesehatan dan sebagainya khususnya pada 19 Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat.

Hasil penelitian Zebua et al., (2020) menemukan bahwa upah berpengaruh positif terhadap konsumsi rumah tangga pada komoditas non makanan. Selanjutnya hasil penelitian Wahyuningsih (2017) juga menemukan bahwa upah berpengaruh positif terhadap konsumsi rumah tangga pada komoditi non makanan di Kabupaten Aceh Barat. Ketika pemerintah daerah sepakat untuk menaikkan upah buruh ditujukan agar mereka dapat memenuhi kebutuhan pokok khususnya pada komoditi konsumsi makanan yang bernutrisi tinggi, selain itu kenaikan upah juga diharapkan dapat membantu masyarakat untuk memiliki kelebihan pendapatan yang tentunya dapat digunakan untuk mengkonsumsi aneka komoditi non makanan seperti rekreasi, olahraga, membeli kendaraan, mendapatkan layanan kesehatan, dan berbagai komoditas lainnya. Hasil penelitian yang konsisten lainnya diperoleh oleh Putri dan Fajar (2018) menemukan bahwa upah berpengaruh positif terhadap pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi non makanan

Berdasarkan uraian fenomena dan sejumlah hasil penelitian terdahulu peneliti merasa tertarik kembali untuk membuat sebuah penelitian yang membahas sejumlah variabel yang dapat mempengaruhi jumlah pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi makanan. Mengingat wabah Covid 19 mendorong masyarakat untuk meningkatkan pola konsumsi makanan dalam rangka menjaga daya tahan tubuh. Penelitian ini dilakukan pada 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Penelitian ini bersifat empiris dan berjudul: **Faktor Faktor yang Mempengaruhi**

Pengeluaran Rumah Tangga Untuk Konsumsi Non Makanan di 19 Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan uraian latar belakang maka diajukan beberapa perumusan masalah yang akan dibuktikan dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah jumlah anggota keluarga berpengaruh terhadap pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi non makanan pada 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat ?
2. Apakah pendidikan berpengaruh terhadap pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi non makanan pada 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat ?
3. Apakah Upah berpengaruh terhadap pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi non makanan pada 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan kepada uraian rumusan masalah maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Membuktikan dan menganalisis pengaruh jumlah anggota keluarga terhadap pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi non makanan pada 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat.
2. Membuktikan dan menganalisis pengaruh pendidikan terhadap pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi non makanan pada 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat.

3. Membuktikan dan menganalisis pengaruh upah terhadap pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi non makanan pada 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Sejalan dengan uraian rumusan masalah dan tujuan penelitian diharapkan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi:

1. Praktisi yaitu pemerintah daerah hasil yang diperoleh dalam penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk mengetahui faktor faktor yang mempengaruhi pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi non makanan,yang tentunya dapat dijadikan acuan dalam mengambil kebijakan dalam menentukan tingkat upah hingga harga pangan khususnya pada 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat.
2. Akademisi hasil yang diperoleh dalam penelitian ini dapat menjadi acuan atau referensi bagi peneliti dimasa mendatang yang juga tertarik untuk membahas permasalahan yang sama dengan penelitian saat ini.